

PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan  
 Tahun Anggaran : 2010

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Kegiatan	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase ibu hamil memeriksakan kehamilan antenatal (cakupan K4)	84%	85,60%	101,9	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	103.921.971.000	82.694.551.678	79,6%
		Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)	84%	84,78%	100,92					
		Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	84%	84,01%	100,01		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	103.071.037.000	85.076.421.670	82,5%
		Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	65%	67,90%	104,46		Pembinaan Gizi Masyarakat	408.941.814.000	338.848.386.831	82,9%
2	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular	Persentase kasus baru TB (BTA positif) yang disembuhkan	85%	89,6%	105,4	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	432.819.719.000	474.933.285.456	109,7%
3	Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan	231	110 RS	47,61	Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	13.002.606.589.000	12.075.767.926.343	92,9%
		Jumlah kota yang memiliki RS memenuhi standar kelas dunia (world class)	1	2	200	Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan			
		Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar	60%	79,80%	133	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	450.205.093.000	370.481.898.512	82,3%
		Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi	70.000	52.279	74,68	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	11.552.114.250	10.918.047.514	94,5%
4	Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	59%	59,07%	100,1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	102.672.936.000	90.763.437.952	88,4%
5	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	50%	54,85%	109,2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	34.656.342.750	32.754.142.541	94,5%
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Kegiatan	Anggaran		
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
6	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpendid, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	Jumlah tenaga strategis yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK	1.200	1.323	110,25	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	337.965.422.000	289.656.766.876	85,7%
7	Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular	Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	40%	33,3%	83,33	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	57.370.000.000	55.971.670.040	97,6%
8	Seluruh Kab/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase kabupaten/kota yang telah menganggarkan APBD bidang kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen dari APBD dalam rangka pencapaian SPM	477	247	51,78	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan	54.913.185.000	40.314.082.758	73,4%

No.	Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Kegiatan	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
								7	8	9
9	Terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80%	82%	102,50	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	6.256.980.000	5.705.009.800	91,2%
10	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan	Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/formula hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan	50	70	140	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		302.122.389.000	257.856.171.717	85,3%
11	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan	40%	60%	150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	79.201.237.000	41.144.438.053	51,9%
		Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian	30%	70%	233,33	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	61.026.616.000	55.561.573.494	91,0%
		Persentase pengadaan menggunakan <i>e-procurement</i>	50%	70%	140	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	11.414.516.000	10.710.033.283	93,8%
12	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan	Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntable	60%	54,17%	90,28	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan.		76.977.600.000	60.730.486.059	78,9%
								15.637.695.561.000	14.379.888.330.577	92,0%

Jumlah Anggaran Tahun 2010 : Rp. 25.273.738.485.000  
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2010 : Rp. 22.470.965.666.522 (88,91%)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kementerian/Lembaga  
Tahun Anggaran

: Kementerian Kesehatan  
: 2010

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian	1 Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS )	105 50	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
1	Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat	1 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS ) 2 Persentase Desa Siaga aktif 3 Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 4 Jumlah kebijakan teknis promosi kesehatan yang terintegrasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 5 Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yang berwawasan kesehatan	50 15 20 5 25	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Pusat Promkes, Setjen
2	Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat	1 Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2 Jumlah Kab/Kota yang memiliki petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan 3 Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan 4 Tersedianya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan 5 Tersedianya produk kebijakan/pedoman penanggulangan krisis kesehatan	105 105 105 5 5	Penanggulangan Krisis Kesehatan	Pusat Penanggulan- Krisis, Setjen
3	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan	1 Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan 2 Tersedianya data NHA setiap tahun 3 Jumlah Kab/Kota mulai melaksanakan DHA 4 Jumlah propinsi mulai melaksanakan PHA 5 Jumlah kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat 6 Jenis perhitungan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas yang dikembangkan 7 Jumlah ketersediaan data kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas 8 Jumlah data PHA yang tersedia 9 Jumlah data DHA yang tersedia	59 1 61 2 2 2 0 2 14	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Setjen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya produk-produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan	1 Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan : a. RUU b. RPP c. R.Per/Keppres d. Per/Kepmenkes 2 Jumlah kasus-kasus hukum bidang kesehatan yang tertangani 3 Jumlah organisasi dan tatalaksana yang tertata di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk UPT 4 Persentase pejabat Eselon I dan II telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas 5 Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan	2 6 2 30 37 10 100 -	Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Organisasi Tatalaksana	Biro Hukum dan Organisasi, Setjen
5	Meningkatnya pengembangan sistem informasi kesehatan	1 Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi, dan Kab/Kota per tahun 2 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan 3 Persentase Kab/Kota yang memiliki data kesehatan terpilah menurut jenis kelamin	80 40 50	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pusat Data dan Informasi, Setjen
6	Meningkatnya dukungan kebijakan pembangunan kesehatan dalam kerjasama luar negeri	1 Jumlah dokumen kerjasama internasional ( <i>MoU/Lol/Agreement</i> ) 2 Jumlah dokumen kerjasama multilateral dan bilateral yang disepakati per tahun ( <i>loan/grant agreement</i> ) 3 Persentase <i>MoU/Lol/Agreement</i> yang ditindaklanjuti 4 Jumlah pokok-pokok hasil kerjasama yang disepakati	5 2 20 10	Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	Pusat Kerjasama Luar Negeri
7	Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi dan publikasi kesehatan	1 Jumlah berita/pesan/info kesehatan yang disebarluaskan kepada publik 2 Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif di media massa 3 Persentase informasi/pengaduan masyarakat melalui jalur telekomunikasi yang ditindaklanjuti oleh unit teknis berwenang 4 Persentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat	800 80 0 -	Pengelolaan Komunikasi Publik	Pusat Komunikasi Publik, Setjen
8	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan	1 Jumlah dokumen kebijakan strategis dalam pembangunan kesehatan yang disusun 2 Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan 3 Jumlah dokumen anggaran yang dihasilkan tepat waktu 4 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan 5 Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesnas yang dihasilkan 6 Persentase penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Renstra, Penilaian Kinerja, Kontrak Kinerja, Pengendalian	7 3 4 9 1 -	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	Biro Perencanaan dan Anggaran, Setjen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur (PNS dan PTT) 2 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu 3 Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian 4 Persentase pegawai yang menerima <i>reward</i> 5 Persentase pegawai yang menerima <i>punishment</i> 6 Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan	70 70 30 83 0,6 80	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Biro Kepegawaian, Setjen
10	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan	1 Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2 Persentase pengadaan menggunakan <i>e-procurement</i>	2 -	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	Biro Keuangan & Perlengkapan, Setjen
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan/manajemen pembayaran gaji PNS dan PTT tepat jumlah, waktu, dan sasaran	Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS dan PTT tepat jumlah,	85	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji	Biro Umum, Setjen
12	Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat pelaksanaan dan pasca haji	1 Angka kematian calon jemaah haji (per 1000 calon jemaah) 2 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar	2,5 30	Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji	Pusat Kesehatan Haji
13	Terselenggaranya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan pelanggaran dugaan kode etik dr dan drg	1 Jumlah surat tanda registrasi (STR) baru dokter dan dokter gigi yang teregistrasi 2 Jumlah produk/kebijakan KKI tentang: a. Registrasi dr dan drg b. Pendidikan profesi dr dan drg c. Pembinaan dr dan drg yang menjalankan praktek kedokteran 3 Jumlah penanganan dugaan pelanggaran kode etik dokter dan dokter gigi	108.000 2 2 2 57	Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia	Sekretariat KKI
14	Meningkatnya peran daerah dalam pembangunan kesehatan dan meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu di daerah	1 Jumlah kajian kebijakan desentralisasi 2 Jumlah kajian kebijakan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) 3 Jumlah daerah bermasalah kesehatan yang meningkat indeks pembangunan kesehatan masyarakat. 4 Jumlah kebijakan teknis penanggulangan daerah bermasalah. 5 Persentase Kab/Kota, Provinsi, Kementerian/Lembaga yang memperoleh advokasi dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan desentralisasi dan penanggulangan daerah bermasalah. 6 Jumlah kebijakan teknis pengelolaan desentralisasi kesehatan 7 Jumlah pedoman pengelolaan desentralisasi yang disosialisasikan.	2 2 - 1 10 1 1	Kajian Desentralisasi dan Daerah Bermasalah Kesehatan	Pusat Kajian Desentralisasi dan DBK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
15	Meningkatnya pengawasan dan penyidikan kesehatan	1 Jumlah kasus yang dilakukan penyidikan 2 Jumlah kasus penyidikan yang ditangani	25 15	Pembinaan, Pengawasan, dan Penyidikan Kesehatan	Pusat Pengawasan dan Penyidikan Kesehatan
16	Terselenggaranya pertimbangan kesehatan nasional	Jumlah kebijakan nasional yang direview	12	Pertimbangan Kesehatan Nasional	Pusat Pertimbangan Kesehatan nasional
17	Terselenggaranya pengawasan rumah sakit Indonesia	Persentase rumah sakit yang dilakukan pengawasan	10	Peningkatan dan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia	Pusat Pengawasan RS Indoensia
II	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian	100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan	Pusat Sarana dan Prasarana Kesehatan, Setjen
1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	1 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman 2 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang melakukan kalibrasi dan proteksi radiasi 3 Jumlah monitoring dan evaluasi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan 4 Jumlah kebijakan, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dihasilkan 5 Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis 6 Jumlah SDM manajemen dan teknis yang berkompeten 7 Persentase pengelolaan gedung Kementerian Kesehatan 8 Penerapan <i>e-government</i> di bidang SPA	231 800 203 12 150 92 100 20	Pengelolaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan	Pusat Sarana dan Prasana Kesehatan, Setjen
III	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan	Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel	60	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	Inspektorat Jenderal
1	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen	1 Persentase laporan hasil audit Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen tepat waktu 2 Persentase NSPK/Standar Audit /Pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan 3 Persentase terlaksananya Program Kerja Pengawasan Tahunan, Satker/Auditan di lingkungan Kementerian Kesehatan 4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan digunakan bagi pengambilan keputusan pimpinan unit kerja dan perbaikan program	100 100 100 100	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen	Inspektur I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen	1 Persentase laporan hasil audit Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen tepat waktu 2 Persentase NSPK /Standar Audit /Pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan 3 Persentase terlaksananya Program Kerja Pengawasan Tahunan, Satker/Auditan di lingkungan Kementerian Kesehatan 4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan digunakan bagi pengambilan keputusan pimpinan unit kerja dan perbaikan program 5 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 100 100 100 60	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen	Inspektur II
3	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes	1 Persentase laporan hasil audit Ditjen PP & PL dan Balitbangkes tepat waktu 2 Persentase NSPK/Standar Audit /Pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan 3 Persentase terlaksananya Program Kerja Pengawasan Tahunan, Satker/Auditan di lingkungan Kementerian Kesehatan 4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan digunakan bagi pengambilan keputusan pimpinan unit kerja dan perbaikan program 5 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 100 100 100 60	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes	Inspektur III
4	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes dan Badan PPSPDM Kesehatan	1 Persentase laporan hasil audit Ditjen Binfar dan Alkes dan Badan PPSPDM tepat waktu 2 Persentase NSPK /Standar Audit /Pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan 3 Persentase terlaksananya Program Kerja Pengawasan Tahunan, Satker/Auditan di lingkungan Kementerian Kesehatan 4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan digunakan bagi pengambilan keputusan pimpinan unit kerja dan perbaikan program 5 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 100 100 100 60	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Binfar & Alkes dan Badan PPSPDM	Inspektur IV
5	Meningkatnya penyidikan, pengusutan dan investigasi kasus-kasus tindak pidana dan berindikasikan KKN	1 Persentase kasus pengaduan masyarakat tentang tindak pidana yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan investigasi 2 Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yang ditetapkan 3 Jumlah auditor yang telah mengikuti Diklat PPNS 4 Persentase pejabat yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	30 2 10 70	Investigasi Hasil Pengawasan	Inspektur Jenderal
6	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	1 Persentase peningkatan dukungan sumber daya sebagai penunjang pengawasan 2 Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang efektif	40 30	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	Sekretariat Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
IV	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan	Jumlah area penelitian yang dilaksanakan	2	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Badan Litbangkes
1	Meningkatnya jumlah riset operasional kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK)	Jumlah riset operasional yang dihasilkan: 1. Riset Komunitas 2. Riset Fasilitas 3. Survei Khusus 4. Riset Ancaman Potensial (KLB) 5. Riset Pembinaan: - IPTEKDOK - Riset Pembinaan Kesehatan	- - - 1 40 30	Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran	Sekretariat Badan Litbangkes
2	Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/kajian di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang dimuat pada media cetak/elektronik file :  a. Nasional, atau b. Internasional	16  10 2	Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan
3	Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan masyarakat intervensif	1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/kajian di bidang kesehatan masyarakat intervensif 2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang kesehatan masyarakat intervensif yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a. Nasional b. Internasional	16  10 2	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Intervensif	Puslitbang Ekologi dan Status Kesehatan
4	Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang klinik terapan dan epidemiologi klinik	1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/formula di bidang klinik terapan dan epidemiologi klinik 2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang klinik terapan dan epidemiologi klinik yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a. Nasional b. Internasional 3 Jumlah formula jamu yang telah distandarisasi	12  10 2 -	Penelitian dan Pengembangan Klinik Terapan dan Epidemiologi Klinik	Puslitbang Gizi dan Makanan
5	Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan	1 Jumlah produk/model/prototipe/standar/formula di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan 2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a. Nasional b. Internasional	6  10 2	Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	Puslitbang Bio Medis dan Farmasi



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas generik dan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan	<p>Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi Litbangkes</li> <li>2. Manajemen bidang ilmiah</li> <li>3. Manajemen kesehatan</li> <li>4. Manajemen etik</li> <li>5. Manajemen tahap-tahap dan komponen kontinum penelitian dan pengembangan kesehatan</li> <li>6. Manajemen kerjasama litbang internasional</li> <li>7. Manajemen pembinaan keteknisan litbang daerah</li> <li>8. Manajemen fungsi generik litbang (perencanaan, umum dan keuangan, hukum dan organisasi kepegawaian, jaringan/JIIPP)</li> </ol>	<p>10</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>10</p> <p>4</p>	Dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan kesehatan	Set Badan Litbangkes
V	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)</li> <li>2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)</li> <li>3. Persentase Balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/balita seluruhnya (D/S))</li> </ol>	<p>84</p> <p>84</p> <p>65</p>	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)</li> <li>2. Persentase ibu hamil mendapat pelayanan <i>Ante Natal Care</i> (ANC)</li> <li>3. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4)</li> <li>4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar</li> <li>5. Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan (Cak KF)</li> <li>6. Persentase ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK)</li> <li>7. Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif (CPR)</li> <li>8. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONE</li> <li>9. Persentase Puskesmas mampu PKRE terpadu</li> <li>10. Persentase Puskesmas mampu tatalaksana PPKtP termasuk korban PTPPO</li> <li>11. Persentase unit utama Kementerian Kesehatan yang membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender</li> <li>12. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terhadap ibu dengan kebutuhan penanganan jiwa khusus (seperti: depresi pasca persalinan)</li> </ol>	<p>84</p> <p>95</p> <p>84</p> <p>10</p> <p>84</p> <p>58,5</p> <p>61</p> <p>67</p> <p>67</p> <p>37</p> <p>30</p> <p>40</p>	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Reproduksi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak	1 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 2 Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) 3 Cakupan pelayanan kesehatan bayi 4 Cakupan pelayanan kesehatan anak Balita 5 Cakupan penanganan neonatal komplikasi 6 Cakupan SD/MI melaksanakan penjangkauan siswa kelas I 7 Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksana PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) 8 Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA) 9 Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terhadap anak dengan kebutuhan penanganan jiwa khusus (seperti: autisme, GPPH, RM)	84 80 84 78 60 80 50 25 15	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Direktorat Bina Kesehatan Anak
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada komunitas dan gender	1 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas perawat di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 2 Terselenggaranya pelayanan kesehatan di 101 Puskesmas prioritas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 3 Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melakukan pelayanan kesehatan dasar 4 Jumlah Puskesmas santun usia lanjut 5 Jumlah Kab/Kota memiliki minimal 2 Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan perkotaan 6 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas menyelenggarakan program kesehatan indera 7 Persentase Puskesmas berfungsi baik 8 Jumlah Kab/Kota memiliki minimal 3 Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga 9 Cakupan Kab/Kota yang memiliki minimal 2 puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional 10 Jumlah Kab/Kota yang memiliki organisasi masyarakat yang peduli kesehatan jiwa 11 Jumlah TPKJM di Kab/Kota yang aktif 12 Jumlah Kab/Kota yang telah menerapkan NSPK Pasung 13 Jumlah Kab/Kota yang memiliki tim penanganan kesehatan jiwa pasca	76 101 8.481 102 57 45 75 75 10 20 40 - 10	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender	Direktorat Kesehatan Komunitas dan Gender

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat	1 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 2 Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) 3 Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif 4 Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 5 Persentase 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A 6 Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet 7 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan surveilans gizi 8 Persentase penyediaan <i>bufferstock</i> MP-ASI	100 65 65 75 75 71 100 100	Pembinaan Gizi Masyarakat	Direktorat Bina Gizi Masyarakat
5	Meningkatnya Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan	1 Jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan kebidanan sesuai standar dan pedoman 2 Jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan sesuai standar dan Pedoman 3 Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat pada penyakit penyebab kematian tertentu sesuai standar dan pedoman 4 Jumlah RS yang menerapkan pelayanan keperawatan sesuai standar dan pedoman 5 Jumlah RS yang menerapkan pelayanan kebidanan sesuai standar dan pedoman 6 Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan keperawatan kepada ODHA dan EID ( <i>Emerging Infectious Disease</i> ) 7 Jumlah RS yang melaksanakan Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional (SP2KP) 8 Jumlah RS yang menerapkan Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) Klinik bagi perawat dan bidan 9 Jumlah RS yang melaksanakan pelayanan keperawatan gawat darurat sesuai standar 10 Jumlah RS yang memberikan pelayanan rawat gabung ibu dan bayi sesuai standar 11 Jumlah RS yang menerapkan surveilans PPI oleh IPCN ( <i>Infection Prevention Control Nurse</i> ) 12 Jumlah NSPK pelayanan Keperawatan dan kebidanan yang disusun 13 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan 14 keperawatan keluarga 15 Jumlah Puskesmas di DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan) yang melaksanakan Pelayanan Perkesmas/ PHN 16 Jumlah Puskesmas yang menyediakan PHN Kit / <i>home care kit</i> 17 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan keperawatan di kelompok khusus dan komunitas 18 Jumlah Puskesmas/fasilitas kesehatan dasar lain yang melaksanakan pelayanan rawat gabung ibu dan bayi sesuai standar	70 42 42 32 4 32 32 32 30 16 35 6 70 20 70 42 120	Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan	Direktorat Keperawatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi 2 Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana KIA dan Gizi di Puskesmas	70.000 2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Set Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
VI	Meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan,	Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia ( <i>world</i>	1	Pembinaan Upaya Kesehatan	Ditjen Bina Upaya Kesehatan
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat	1 Persentase Puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar 2 Persentase fasilitas kesehatan dasar selain puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar 3 Persentase fasilitas kesehatan dasar yang melaksanakan pelayanan kedokteran keluarga 4 Persentase fasilitas kesehatan dasar yang telah melaksanakan pelayanan kedokteran gigi keluarga 5 Jumlah Puskesmas yang melayani kesehatan jiwa dan NAPZA	70 20 30 20 69	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
2	Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat	1 Jumlah kota yang memiliki RS standar kelas dunia ( <i>world class</i> ) 2 Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK 3 Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS) 4 Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 5 Persentase RS daerah dengan kesiapan pelayanan EID ( <i>Emerging Infectious Disease</i> ) TB 6 Persentase RS Kab/Kota yang menerapkan SPM RS 7 Jumlah RS Provinsi dan RS Kab/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA 8 Persentase RS (Kelas A dan B) yang mengembangkan pelayanan geriatric 9 Persentase RS pemerintah yang siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi TB 10 Persentase RS yang melaksanakan program keselamatan pasien 11 Jumlah RS pendidikan yang melaksanakan pengendalian resistensi antimikroba 12 Jumlah pelayanan jantung dan pembuluh darah di RS dan jejaringnya sesuai standar 13 Jumlah RS pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar RS Pendidikan	1 80 60 14 20 20 53 20 20 20 20 20 40	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Direktorat Bina Upaya kesehatan Rujukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
		14 Jumlah RS yang melaksanakan perawatan KMC dan IMD 15 Persentase RSU pemerintah siap melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 16 Jumlah RS Kab/Kota yang menyediakan 10 TT untuk pelayanan kegawatdaruratan psikiatrik 17 Persentase RSJ yang menerapkan SPM RSJ 18 Persentase RSJ yang memberikan pelayanan psikiatri anak dan remaja sesuai pedoman 19 Persentase RSJ yang memberikan pelayanan psikogeriatrik sesuai pedoman 20 Persentase RSJ yang memberikan pelayanan psikiatrik forensik sesuai pedoman 21 Persentase RSJ yang memberikan pelayanan penanggulangan ketergantungan NAPZA sesuai pedoman 22 Persentase RSJ yang menerapkan model pelayanan keperawatan professional (MPKP) 23 Persentase RSJ yang memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial sesuai pedoman 24 Persentase Kab/Kota yang telah melakukan pemeliharaan, peningkatan, dan penanggulangan intelegensia kesehatan 25 Jumlah kebijakan yang dihasilkan tentang pemeliharaan, peningkatan kemampuan, dan penanggulangan masalah kesehatan intelegensia 26 Jumlah pelaksanaan penilaian intelegensia pejabat pusat dan daerah 27 Jumlah kab/kota yang memiliki UTD 28 Jumlah UTD yang melaksanakan pelayanan darah aman 29 Jumlah RS pemerintah yang memiliki BDRS 30 Jumlah RS Rujukan Flu Burung yang memberikan pelayanan sesuai pedoman 31 Persentase RS pemerintah yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 32 Persentase entrypoint, transito, dan RS rujukan TKIB yang melaksanakan pelayanan medik dan gawat darurat bagi TKIB 33 Persentase RS rujukan haji yang melaksanakan pelayanan medik dan gawat darurat bagi jemaah haji yang memerlukan	15 20 18 40 40 40 40 40 40 40 40 8 10 150 402 211 150 90 60 20 50		
3	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/komplementer alternatif	1 Jumlah RS yang menyediakan pelayanan kesehatan tradisional/komplementer alternatif 2 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai pedoman kesehatan 3 Jumlah metode pelayanan kesehatan komplementer alternatif yang telah ditetapkan aman dan efektif untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan 4 Jumlah RS pendidikan melaksanakan ciri-ciri pelayanan komplementer	26 20 3 16	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional/Komplementer Alternatif	Direktorat Bina Upaya Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja, olahraga, dan Matra	1 Persentase Kab/Kota yang minimal mempunyai 4 Puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja 2 Persentase Kab/Kota dengan sarana kesehatan (RS, Laboratorium, Gudang Farmasi, Dinas Kesehatan) Pemerintah telah menerapkan kesehatan kerja 3 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian faktor risiko dan pelayanan kesehatan penyelaman 4 Jumlah KKP yang melaksanakan kesehatan penerbangan 5 Jumlah lokasi situasi khusus dan pengungsi yang dikendalikan faktor risikonya	15 15 32 8 100	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja, Olahraga, dan Matra	Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kerja dan
5	Terselenggaranya standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	1 Persentase RS yang terakreditasi 2 Jumlah Labkes (BLK) yang terakreditasi 3 Persentase RS yang melaksanakan pelayanan keterampilan fisik sesuai standar 4 Jumlah labkes yang mengikuti program pematapan mutu eksternal 5 Persentase RS pemerintah yang melaksanakan pelayanan radiologi diagnostik sesuai standar 6 Jumlah RS pemerintah yang melaksanakan pelayanan radioterapi sesuai standar 7 Jumlah RS pemerintah yang melaksanakan pelayanan kedokteran nuklir sesuai standar 8 Jumlah Labkes rujukan kultur TB (BBLK, BLK, dan RS A dan B) 9 Jumlah Labkes rujukan kultur DST TB tersertifikasi (BBLK, BLK, RS dan Lab. Univ) 10 Jumlah Lab Rujukan <i>Early Infant Diagnostic</i> (EID) HIV 11 Persentase lab yang melaksanakan pelayanan NAPZA sesuai standar 12 Persentase RS yang melaksanakan pelayanan keteknisan medik sesuai standar	50 8 45 600 45 14 3 17 5 1 50 45	Pembinaan Standarisasi, Akreditasi, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Direktorat Bina Standarisasi, Akreditasi dan Mutu
6	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS	1 Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 2 Jumlah kunjungan penduduk miskin ke rumah sakit (juta penduduk)	75 5	Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Miskin	Direktorat Bina Upaya kesehatan Rujukan
7	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi	8.481	Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
8	Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas	1 Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM 2 Jumlah pedoman 3 Jumlah instrumen teknis 4 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi BOK	300 1 1 1	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Ditjen Bina Upaya Kesehatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan	1 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 2 Peningkatan jumlah RS/BLK yang terpenuhi fasilitas sarana dan prasarana 3 Pengembangan UPT Puskesmas 4 Jumlah NSPK di bidang pelayanan medik yang harus ditetapkan 5 Persentase RS yang melaksanakan SIRS baik <i>online</i> maupun manual 6 Jumlah provinsi yang mendukung pelaksanaan program upaya pelayanan kesehatan (dekon)	34 330 RS dan 22 BLK 8 50 70 32	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
VII	Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit	1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 3 Jumlah kasus TB (per 100.000 penduduk) 4 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 5 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 6 Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk 7 Prevalensi kasus HIV 8 Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 9 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 10 Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat 11 Persentase Provinsi dengan angka kasus baru TB Paru BTA positif/ CDR ( <i>Case Detection Rate</i> ) minimal 70 % 12 Persentase provinsi mencapai angka keberhasilan pengobatan kasus baru TB Paru BTA positif/SR ( <i>Success Rate</i> ) minimal 85% 13 Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB 14 Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 15 Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)	80 2 235 73 85 55 0,2 350 2.500 50 15 80 <1 40 50	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Ditjen PP dan PL
1	Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan	1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2 Persentase desa yang mencapai UCI 3 Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate per 100.000 anak < 15th 4 Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 Jam pada Desa/Kelurahan yang mengalami KLB 5 Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan 6 Persentase anak usia Sekolah Dasar yang mendapat imunisasi 7 Persentase kasus potensial PHEIC yang terdeteksi di pelabuhan, Bandara, dan Bus Lintas Batas Barat	80 80 ≥2 68 70 98 100	Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan	Direktorat Imunisasi dan Karantina

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
		<p>8 Persentase Bebas vektor penular penyakit di perimeter area (<i>House Index</i> = 0) dan <i>buffer area</i> (<i>House Index</i> &lt; 1) di lingkungan pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat</p> <p>9 Persentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi dilakukan tindakan karantina ≤ 24 jam setelah ditetapkan oleh pemerintah.</p>	<p>30</p> <p>100</p>		
2	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	<p>1 Prevalensi kasus HIV</p> <p>2 Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk</p> <p>3 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan</p> <p>4 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan</p> <p>5 Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk</p> <p>6 Persentase ODHA yang mendapatkan ART</p> <p>7 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS</p> <p>8 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan Surveillance HIV dan Syphilis</p> <p>9 Persentase Provinsi dengan angka kasus baru TB Paru BTA positif/ CDR (<i>Case Detection Rate</i>) minimal 70 %</p> <p>10 Persentase provinsi mencapai angka keberhasilan pengobatan kasus baru TB Paru BTA positif/SR (<i>Success Rate</i>) minimal 85%</p> <p>11 Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB</p> <p>12 Persentase cakupan penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia balita</p> <p>13 Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR) Kusta per 100.000 penduduk</p> <p>14 Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan <i>testing</i> HIV</p> <p>15 Angka Penemuan kasus Baru Frambusia (per 100.000)</p> <p>16 Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta (per 100.000)</p>	<p>0,2</p> <p>235</p> <p>73</p> <p>85</p> <p>350</p> <p>30</p> <p>65</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>80</p> <p>&lt;1</p> <p>60</p> <p>&lt;5</p> <p>300.000</p> <p>10.000</p> <p>1</p>	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Direktorat Pengendalian Penyakit Menular
3	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	<p>1 Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk</p> <p>2 Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk</p> <p>3 Persentase kasus <i>suspect</i> flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standar</p> <p>4 Persentase kasus zoonosa lainnya (rabies, antraks, pes, leptospirosis) yang ditangani sesuai standar</p> <p>5 Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap jumlah penduduk endemis</p> <p>6 Persentase kabupaten/kota yang melakukan <i>mapping</i> vektor</p> <p>7 Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)</p> <p>8 Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi</p>	<p>55</p> <p>2</p> <p>100</p> <p>70</p> <p>40</p> <p>30</p> <p>60</p> <p>100</p>	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	1 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 2 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 4 Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat 5 Persentase Penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 6 Cakupan daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim 7 Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 8 Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 9 Persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) sebesar 100 % Kab/Kota 10 Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan 11 Persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan kota sehat yang sesuai standar sebesar 50 %	62 85 64 50 71 20 76 75 18 55 12	Penyehatan Lingkungan	Direktorat Penyehatan Lingkungan
5	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	1 Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 2 Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) 3 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular ((SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) 4 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan <i>Clinical Breast Examination (CBE)</i> 5 Persentase Kab/Kota yang mempunyai peraturan perundangan-undangan (Surat Edaran/Instruksi/SK/Peraturan Walikota/Bupati/Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan	40 50 10 5 10	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
6	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan	1 Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarannya 2 Peningkatan jumlah, jenis, kualitas sarana dan prasarana pada seluruh satker pusat 3 Jumlah rencana koordinasi Ditjen PP&PL dalam 1 tahun yang dilakukan 4 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan 5 Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan 6 Persentase SDM yang dibina	59 6 12 3 3 50	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Sekretariat Ditjen P2PL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
VIII	Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Ditjen Binar dan Alkes
1	Meningkatnya ketersediaan Obat Essensial Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 2 Persentase obat yang memenuhi standar, cukup dan terjangkau 3 Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/kapita) 4 Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota sesuai standar	80 70 Rp.13.000/kapita 60	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
2	Meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan dan PKRT	1 Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik 2 Persentase sarana distribusi alat kesehatan yang memenuhi persyaratan distribusi 3 Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat	60 50 70	Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT	Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes dan PKRT
3	Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal	1 Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar 2 Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 3 Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan	25 10 30	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik
4	1. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal 2. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian 3. Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	1 Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri 2 Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi 3 Jumlah industri farmasi nasional memperoleh prakualifikasi WHO untuk produk obat program	5 2 0	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Sekretariat Dijen Binar dan Alkes/Dit Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
5	Meningkatnya dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1 Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan 2 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi	80 60	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Sekretariat Ditjen Binar dan Alkes

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6
IX	Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan	1 Persentase tenaga kesehatan yang professional dan memenuhi standar kompetensi 2 Jumlah lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar 3 Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai-SDM kesehatan sesuai	60 14 60	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Badan PPSDMK
1	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan	1 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK 2 Jumlah residen senior yang didayagunakan dan diberikan insentif 3 Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan 4 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri 5 Jumlah Kab/Kota yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1.200 700 3 500 50	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Pusrengunnakes
2	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan Aparatur	1 Jumlah pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi 2 Jumlah lembaga unit pelatihan kesehatan yang terakreditasi 3 Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan manajemen kesehatan	200 4 35.000	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Pusdiklat SDM Kesehatan
3	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan 2 Jenis pendidikan tenaga kesehatan yang dikembangkan 3 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional 4 Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan 5 Persentase institusi diknakes yang diakreditasi dan mendapat strata A 6 Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat (UU No. 14/2005)	2.350 5 5.000 4 42 500	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Pusdiknakes
4	Terselenggaranya sertifikasi, standarisasi, dan peningkatan mutu SDM kesehatan	1 Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan 2 Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi 3 Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki STR 4 Jumlah dokter peserta <i>internship</i>	7.530 30 1.000 1.200	Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Pusat Pemberdayaan Profesi dan Nakes LN
5	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1 Jumlah UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarannya 2 Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah 3 Jumlah tenaga pendidik yang melaksanakan riset 4 Jumlah dokumen UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan 5 Jumlah institut kesehatan yang terbentuk	30 13.000 500 30 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN 2010 - 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	1	2
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase ibu hamil memeriksakan kehamilan antenatal (cakupan K4)
		Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)
		Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
		Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)
2	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular	Persentase kasus baru TB (BTA positif) yang disembuhkan
3	Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan
		Jumlah kota yang memiliki RS memenuhi standar kelas dunia ( <i>world class</i> )
		Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar
		Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi
4	Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan
5	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	1	2
6	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	Jumlah tenaga strategis yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK

7	Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular	Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
8	Seluruh Kab/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase kabupaten/kota yang telah mengalokasikan APBD bidang kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen dari APBD dalam rangka pencapaian SPM

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
	1	2
1	Terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin	Persentase ketersediaan obat dan vaksin
2	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan	Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/ formula hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan
3	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan
		Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian
		Persentase pengadaan menggunakan <i>e-procurement</i>
4	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan	Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel